



**PUSAT STUDI KEBIJAKAN NASIONAL**  
*bersama*  
**PUSAT PENGKAJIAN PENGADAAN INDONESIA**



Pusat  
Pengkajian  
Pengadaan  
Indonesia

Nomor : 271/TN.PBJ/Pusdiknas-P3I/IX/2014  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Undangan Temu Nasional  
Pengadaan Barang/Jasa di Desa**

Jakarta, 17 September 2014

Kepada Yth,  
1. **Bupati / Walikota**  
2. **Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)**  
3. **Kepala Bagian Hukum**  
4. **Kepala Bagian Pemerintahan Desa**  
5. **Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**  
6. **Camat**  
Di -  
Seluruh Indonesia

Dengan Hormat,

Dengan terbitnya **Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** dimana Desa menjadi unit otonom dalam hal mengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa, maka pembenahan tata kelola Desa menjadi hal yang sangat penting. Pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa di Desa jangan sampai menyebabkan **korupsi** mengalir ke Desa.

Aparatur Desa harus dibekali pengetahuan, pemahaman, keterampilan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara baik dan benar. Pengelolaan APBDes adalah hal baru bagi aparatur Desa. Tersedianya aturan yang jelas, lengkap dan mudah dilaksanakan adalah satu keharusan

Dalam kerangka itu selain aspek tata kelola keuangan, Peraturan Kepala Daerah Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa harus segera dirumuskan. Seperti amanat **Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013** tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa pengadaan barang/jasa diatur melalui **Peraturan Kepala Daerah (Perbup/Perwali)**.

Untuk membicarakan hal-hal tersebut secara komprehensif, kami mengundang Bapak/Ibu / Saudara, untuk mengikuti kegiatan Temu Nasional bertajuk :

**Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Desa  
"MENYONGSONG 1 MILYAR 1 DESA"**

Kegiatan akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis - Jum'at  
Tanggal : 13 - 14 Nopember 2014  
Tempat : Hotel Mercure Kota  
Jl. Hayam Wuruk No. 123 Jakarta Pusat 11160

Demi tercapainya pembangunan desa yang maju dan sejahtera maka kami mengajak seluruh pihak terutama pemegang kebijakan, pelaksana pengadaan/barang/jasa, aparatur desa dan pihak-pihak lain untuk bergabung dan berbagi pendapat dan pengetahuan pada kegiatan dimaksud. Untuk Informasi hubungi Samsul Ramli Hp. **0813 5109 0308**

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih

Pusat Studi Kebijakan Nasional  
  
**B.H Yusuf Tonda**  
Direktur

Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia  
  
**Khalid Mustafa**  
Ketua

**Gratis CD File**

1. **Contoh Peraturan Kepala Daerah  
Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa**
2. **Contoh Formulir Swakelola Lengkap**

Temu Nasional PBJ di Desa  
**“Menyongsong 1 Milyar 1 Desa”**  
Hotel Mercure Kota - Jakarta, 13 - 14 Nopember 2014

## **Pengantar**

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa harus dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itulah kemudian terbit **Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/20014)**.

Dalam UU 6/2014 ini, salah satu yang paling krusial dan sangat terkait dengan pengadaan barang/jasa adalah Pasal 71 dan 72 yang menyuratkan bahwa desa mempunyai hak dan kewajiban mengelola pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pembicaraan hangat sekarang ini adalah tentang kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut alokasi dana desa. Secara bertahap, desa akan mendapat tambahan pendapatan di luar pendapatan asli desa, bagi hasil pajak/retribusi daerah senilai 10%, bagian dari dana perimbangan 10%, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, serta hibah sebagaimana diatur dalam **PP RI No. 72/2005 tentang Desa, lebih kurang satu miliar rupiah**.

Besarnya akumulasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) ke depan membawa konsekuensi pada beban pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang/jasa. Gegap gempita dan hiruk-pikuk pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang/jasa akan mengalir dengan deras ke desa. Jika hal ini tidak dibarengi dengan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keahlian mengelola pengadaan barang/jasa di desa, potensi penyimpangan tidak akan terhindarkan. Dan petaka korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi momok menakutkan akan mencengkram desa.

## **Tujuan**

1. Temu nasional diharapkan menjadi salah satu referensi para pihak yang terlibat dalam kebijakan pengadaan barang/jasa di desa, sehingga dapat memperoleh rujukan dan rumusan jitu menyusun kebijakan pengadaan barang/jasa di desa.
2. Selain mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman, sharing ide dan gagasan dalam temu nasional diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang akan dihadapi dalam kerangka penyusunan dan implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa di Desa
3. Temu nasional ini mencoba menghadirkan berbagai narasumber yang sangat terlibat dan berkepentingan dalam menyusun berbagai peraturan perundang-undangan tentang Desa khususnya pengadaan barang/jasa (LKPP, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPK, BPKP dan Lembaga lain), sehingga diharapkan ada titik temu pandangan yang mampu mempertajam penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa di desa.
4. Yang paling mendasar tentu saja, bahwa temu nasional dapat menghasilkan satu gambaran riil tentang regulasi pengadaan barang/jasa di desa. Diharapkan selepas temu nasional ini masing-masing daerah Kabupaten/Kota segera dapat menyusun, menerbitkan ataupun menyempurnakan peraturan kepala daerah tentang pengadaan barang/jasa di desa.

## **Sasaran Audiens/Peserta Aktif**

1. Kepala Daerah (Bupati/Walikota)
2. Sekretaris Daerah
3. Bagian Hukum Kabupaten/Kota
4. Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
6. Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota
7. Camat dan Kepala Desa
8. Akademisi

## JADWAL TEMU NASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI DESA

### “MENYONGSONG 1 MILYAR 1 DESA”

Hotel Mercure - Jakarta, 13-14 Nopember 2013

#### Rabu, 12 Nopember 2014

12.00 - 21.00 Registrasi peserta, pengambilan materi dan check in

#### Kamis, 13 Nopember 2014

08.00 - 08.30 PEMBUKAAN

- Laporan Ketua Panitia  
(Syahrul Salam)

- Sambutan Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)  
(Khalid Mustafa)

08.30 - 10.00 Harapan dan Tantangan Mengelola Dana Desa  
Narasumber : **Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah)**

10.00 - 10.15 *Istirahat*

10.15 - 12.00 Mencegah Korupsi sampai ke Desa  
Narasumber : **Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)\***

12.00 - 13.00 *ISHOMA*

13.00 - 15.00 Diskusi Panel

- Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa

- Kebijakan Tata Kelola Keuangan di Desa

- Aspek Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan di Desa

Narasumber : - **Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan**

- **Direktorat PMD Kementerian Dalam Negeri**

- **Ketua Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia (APDESI)**

15.00 - 15.15 *Istirahat*

15.15 - 17.00 Lanjutan Diskusi Panel

#### Jum'at, 14 Nopember 2014

08.00 - 10.00 Memformulasikan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Narasumber : **Rita Berlis (Direktur Pengembangan Strategi Kebijakan Pengadaan Khusus - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)**

10.10 - 10.15 *Istirahat*

10.15 - 11.45 lanjutan

11.45 - 13.30 *ISHOMA (sholat jum'at)*

13.30 - 15.00 Diskusi Panel

- Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa di Desa

- **Menyusun Peraturan Kepala Daerah Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa**

- Aspek Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Narasumber : - **Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)**

- **Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

- **Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)**

15.00 - 15.15 *Istirahat*

15.15 - 16.45 Lanjutan Diskusi Panel

16.45 - 17.00 Penutupan dan pembagian sertifikat

#### Sabtu, 15 Nopember 2014

09.00 - 12.00 Peserta check out

\*) Dalam konfirmasi

# FORMULIR PENDAFTARAN

Pendaftaran dapat di email : samsulramli@yahoo.com atau SMS. 0813 5109 0308

**PESERTA 1**

Nama Lengkap : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Telp. Kantor/Fax : .....  
No. Handphone : .....

**PESERTA 2**

Nama Lengkap : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Telp. Kantor/Fax : .....  
Handphone : .....

**PESERTA 3**

Nama Lengkap : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Telp. Kantor/Fax : .....  
Handphone : .....

## BIAYA KONTRIBUSI

**@Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)**

Tidak termasuk akomodasi

**@Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**

Termasuk akomodasi hotel twin share untuk 4 hari 3 malam

## FASILITAS PESERTA

- CD File Contoh Swakelola Lengkap
- Contoh Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- Dua Buku (*buku Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, buku bacaan wajib Swakelola pengadaan barang/jasa pemerintah*)
- Modul dan materi slide dan **Sertifikat Temu Nasional**
- Makan siang dan rehat kopi pagi dan sore selama kegiatan
- Video sosialisasi dan konsultasi gratis dengan narasumber.

## PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI

Transfer Bank BRI Nomor Rekening; 0522 01 000210 304  
Atas Nama : Lembaga Pusat Studi Kebijakan Nasional

Tunai saat registrasi di hotel

**PENDAFTARAN HUBUNGI BAPAK SAMSUL RAMLI HP.0813 5109 0308**